

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pemerintahan yang baik mengakibatkan reformasi pengolahan aspek anggaran. Mempertahankan tata kelola yang efektif memerlukan peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara. Kualitas pengolahan keuangan yang prima harus dipastikan dan ditingkatkan melalui beberapa langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Hal ini akan menjamin dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Pengertian good governance dihubungkan dengan proses keuangan dengan good governance. Dalam konteks ini, “baik” mengacu pada kepatuhan terhadap serangkaian peraturan yang sejalan dengan dasar-dasar tata pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia, tata kelola yang baik adalah penerapan manajemen pembangunan yang sehat dan cermat serta konsisten dengan prinsip-prinsip pasar yang demokratis dan efisien; hal ini juga mencakup menghindari kesalahan alokasi dana investasi, mencegah korupsi politik dan administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan membangun kerangka pertumbuhan yang legal dan politis. upaya komersial.

Perubahan kelembagaan dan reformasi manajemen publik diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik (reformasi manajemen publik). Peningkatan arsitektur dan organisasi seluruh instrumen pemerintah daerah merupakan bagian dari transformasi kelembagaan. Pemberdayaan seluruh aktor daerah, DPRD sebagai “shareholder”, masyarakat umum sebagai “stakeholder”, dan pemerintah daerah sebagai eksekutif sangat penting dalam transformasi kelembagaan.

Jika lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan audit bekerja dengan baik, maka tata kelola yang baik akan terwujud. Peningkatan metode pemantauan dan inspeksi diperlukan jika organisasi audit dan pengawasan dijalankan dengan baik. Salah satu strateginya adalah memperkuat implementasi audit. Audit nilai uang, juga dikenal sebagai audit kinerja, sangat penting selain audit keuangan. Audit value for money yang disebut juga dengan audit kinerja dan juga diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007, merupakan audit yang dilakukan untuk menilai kondisi keuangan, efektivitas, dan efisiensi suatu program, kegiatan, dan satuan kerja tertentu.

Anggaran budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, Mahmudi (2010). Manajemen dan budget terkait erat. Manajemen berkaitan dan mempunyai hubungan yang dengan penyusunan rencana (planning) dan pengkoordinasi pekerjaan (coordinating). Tujuan, efektifitas, efisiensi, dan keberhasilan akan sulit dicapai jika tidak ada anggaran. Pembuatan rencana kerja dengan istilah satuan moneter merupakan proses pembuatan anggaran., tujuan anggaran dibuat untuk membuat rencana kerja yang terkait dengan uang. Anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek adil dan sifat patuh yang diperlukan oleh kegunaan fungsional beserta realisasi pendistribusian keuangan daerah, serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

Anggaran pemerintah daerah merupakan kesepakatan formal antara legislatif dan eksekutif mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan operasional pemerintahan dan perkiraan pendapatan untuk menutupi biaya-biaya tersebut, serta pendanaan yang diperlukan jika terjadi proyeksi defisit atau surplus. Oleh karena itu, anggaran tersebut menjadi landasan bagi upaya pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dan mengamankan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, sering kali satu tahun, dan juga mengatur operasi belanja di antara mereka. Apabila suatu dinas mengabaikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sepanjang proses penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah, maka anggaran pelayanan tersebut tidak akan terealisasi dengan baik. Selain itu, tujuan penyusunan anggaran juga perlu dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan agar kegiatan dan pengeluaran yang dijadwalkan dapat terpenuhi sepenuhnya dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah telah mewajibkan setiap satuan kerja (SKPD) untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Setiap SKPD menghasilkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang juga dikenal sebagai RKA SKPD. Di dalam RKA SKPD tersebut berisikan indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah memuat sasaran dari anggaran itu sendiri. Apabila suatu dinas tidak bisa menyusun rencana keuangan atau anggaran dengan baik dan tidak dapat memperhatikan kebijakan yang berlaku dalam proses penyusunannya oleh pemerintah daerah, maka rencana anggaran dan pembelanjaan dinas tersebut tidak akan berjalan atau terealisasi dengan baik.

Selain itu, tujuan penyusunan anggaran harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku agar kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembelanjaan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan sempurna agar suatu dinas tersebut dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah terlaksana tersebut dengan baik kepada pemerintah dan masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh suatu dinas kepada pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran yang berisikan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang harus dilengkapi dengan analisis perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran selama periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi kesalahan dan sumbernya. Laporan Realisasi Anggaran ini digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatan pada waktu yang tepat dan digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang.

Laporan Realisasi Anggaran termasuk salah satu ke dalam akuntansi keuangan pemerintahan, keberadaan standar akuntansi keuangan pemerintahan ini mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi keuangan pemerintahan akan menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberikan kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Salah satu entitas

akuntansi di bawah badan pusat statistik adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu tugasnya adalah menyusun laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pedoman pengelolaan keuangan secara hati-hati pada pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dirujuk pada saat pembuatan laporan keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Untuk memberikan informasi keuangan yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, laporan keuangan ini disusun dan disajikan secara akrual.

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan lebih lanjut dalam judul **“Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis bermaksud merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan: Bagaimana Analisis Realisasi Anggaran Belanja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020–2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui analisis realisasi anggaran belanja pada BPS Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

1. Menambah ilmu tentang Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah.
2. Mampu meningkatkan pemahaman dan menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sebagai perbandingan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bagi Instansi
 1. Sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan agar dapat bekerja sama lebih lanjut di berbagai bidang.
 2. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bagi Universitas
 1. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerja keuangan.
 2. Dapat menciptakan lulusan yang dapat bekerja secara professional di bidangnya masing-masing.

1.5 Tempat Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di JL. Khatib Sulaiman No. 48, Ulak Karang, Padang Utara, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaannya yaitu 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Keperpustakaan
Dalam metode ini, langkah awal yang dilakukan yaitu mencari, membaca serta mengumpulkan data referensi dari buku, jurnal, teks maupun website yang ada di internet.
2. Studi Lapangan
Penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan pada saat magang di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
3. Wawancara
Penulis melakukan wawancara secara lisan untuk mengumpulkan data dan mengajukan pertanyaan langsung jika ada keraguan terkait data yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Magang ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yang akan membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas beberapa unsur yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang digunakan dan segala pembahasan terkait judul yang diajukan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan baik itu dari segi sejarah, tugas, struktur, visi dan misi dan lainnya terkait perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan dan menjelaskan data data yang di dapat selama kegiatan magang berlangsung, yaitu tentang bagaimana penyusunan anggaran dan realisasi belanja pemerintah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan juga pembahasan masalah yang terjadi serta saran yang berguna untuk pertimbangan di masa yang akan datang.

